

Optimalisasi Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Guna Meningkatkan Kinerja Akun di Akademi Angkatan Laut

Optimization Of Treasury Expenditure Certification To Improve Account Performance In The Naval Academy

Ferry Praba Kusuma, Heru Sancoko, Donny Anshar

Akademi Angkatan Laut
sriwulanpk99@gmail.com

Alamat: Jl. Bumimoro Morokrembangan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Penulis korespondensi: sriwulanpk99@gmail.com

Abstract: The State Finance, as regulated in Law Number 17 of 2003, requires adequate oversight in its management. Consideration in determining the oversight for financial treasurer is done by assessing it from external and internal factors. The importance of expenditure treasurer certification in supporting performance within the unit is also highly needed. The success of an institution in realizing a work program depends on an expenditure treasurer who manages all financial inflows and outflows within the institution to facilitate the implementation of a work program. This research is conducted due to several issues, including frequent delays in allowances for Naval Academy Cadets and suboptimal performance of the Expenditure Treasurer at the Naval Academy. Meanwhile, the purpose of this research is to find solutions to address the existing problems, for which the author collects data through observation, interviews, and questionnaires. The research results indicate that the quality of performance of the Expenditure Treasurer at the Naval Academy is still suboptimal, primarily due to vacant positions in the Expenditure Treasurer role within the Naval Academy. The position of Expenditure Treasurer is held by an officer who structurally does not hold that position. Additionally, the officer also holds more than one position, resulting in suboptimal performance of the Expenditure Treasurer. Administratively, to strengthen the position professionally in the financial field, the certification of Expenditure Treasurer is required according to PMK No. 126/PMK.05/2016. However, the current Expenditure Treasurer has not undergone certification because there is no certification for first-level officers within the Navy environment.

Keywords: certification, expenditure treasurer, performance

Abstrak: Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memerlukan pengawas yang memadai dalam pengelolaannya. Pertimbangan dalam menentukan pengawas sebagai bendahara keuangan dilakukan dengan menilainya dari segi faktor eksternal dan internal. Pentingnya sertifikasi bendahara pengeluaran dalam menunjang kinerja di satuan juga sangat di butuhkan. sukses tidaknya suatu instansi dalam merealisasikan suatu program kerja tergantung pada seorang bendahara pengeluaran yang mengatur segala urusan keluar masuknya dana dalam instansi guna berjalannya suatu program kerja. Penelitian ini disusun dengan adanya beberapa permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan uang saku pada Taruna Akademi Angkatan Laut dan kurang optimalnya kinerja Bendahara Pengeluaran di Akademi Angkatan Laut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada, untuk itu penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara serta kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara esensi kualitas kinerja Bendahara Pengeluaran di Akademi Angkatan laut masih belum optimal diantaranya karena kekosongan jabatan dalam Bendahara Pengeluaran di lingkungan Akademi Angkatan Laut. Jabatan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh perwira yang secara struktural tidak menduduki jabatan tersebut. Disamping itu perwira tersebut juga menjabat lebih dari 1 jabatan sehingga menyebabkan kurang maksimalnya kinerja Bendahara Pengeluaran. Secara administrasi untuk memperkuat jabatan secara profesional di bidang keuangan dengan diadakannya sertifikasi Bendahara Pengeluaran sesuai PMK No. 126/PMK.05/2016 sedangkan Bendahara Pengeluaran yang ada saat ini belum melaksanakan sertifikasi karena belum adanya sertifikasi pada level perwira pertama di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Kata kunci: sertifikasi, bendahara pengeluaran, kinerja

1. PENDAHULUAN

Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memerlukan pengawak yang memadai dalam pengelolaannya. Pengelola keuangan negara tersebut sebagai sumber daya manusia (SDM) yang diwujudkan antara lain melalui berbagai program peningkatan kemampuan Pejabat Perbendaharaan Negara. Pejabat Perbendaharaan Negara ini berfungsi sebagai penyalur dan pengawas keluar masuknya keuangan negara dengan tugas membuat Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Organisasi (RAPBO) selama satu periode kepengurusan yaitu memeriksa pembukuan satu tahun kebelakang, mempelajari rencana kegiatan selama periode kepengurusan dan menyesuaikan RAPBO dengan perkiraan pemasukan yang akan diperoleh. Sehingga dibuatlah rencana kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala dalam anggaran. Rencana kegiatan disusun secara skala prioritas untuk di realisasikan sesuai dengan dana anggaran yg di miliki. Sehingga pegawai bendahara keuangan yang ditunjuk harus benar-benar profesional.

Pertimbangan dalam menentukan bendahara keuangan dari segi faktor eksternal dan faktor internal. Dalam faktor eksternal seorang pegawai bendahara keuangan wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam suatu organisasi. Sedangkan pada faktor internal yang terdapat dalam setiap masing- masing individu yang mempunyai perbedaan. Faktor internal dapat kita laksanakan melalui seleksi dengan cara melakukan tes psikologi intelegensi seseorang secara berkala dan berlanjut sebagai tolok ukur kemampuannya menjadi seorang bendahara pengeluaran. Menjadi Bendahara pengeluaran yang profesional tentunya tidak hanya di butuhkan beberapa faktor saja. Pentingnya sertifikasi bendahara pengeluaran dalam menunjang kinerja sangat di butuhkan. Karena sukses tidaknya suatu instansi dalam merealisasikan suatu program kerja tergantung pada seorang bendahara pengeluaran yang mengatur segala urusan keluar masuknya dana dalam instansi guna berjalannya suatu program kerja.

Penelitian ini disusun dengan adanya beberapa permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan uang saku pada Taruna Akademi Angkatan Laut dan kurang optimalnya kinerja Bendahara Pengeluaran di Akademi Angkatan Laut. Sedangkan tujuan dari peneltian ini adalah mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada, untuk itu penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara serta kuesioner. Adapun referensi dalam penelitian ini adalah sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi (Heri Susilawati, 2014). Dengan hasil penelitian bahwa peran bendahara

pengeluaran sangat berpengaruh terhadap hasil dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain oleh Manik Krismanto Amriadi pada tahun 2017 berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Samosir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan dan kejelasan peran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bendahara.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu menggambarkan suatu situasi dari hasil data yang diperoleh, yang bertujuan untuk memahami suatu situasi, sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Fokus penelitian adalah sertifikasi bendahara pengeluaran di lingkungan Akademi Angkatan Laut. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan observasi langsung pada lingkungan kantor di Akun Akademi Angkatan Laut serta melaksanakan wawancara terhadap narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar nama narasumber

NO	NAMA	Jabatan
1.	Letkol laut (S) Heru Sancoko	Narasumber 1
2.	Mayor laut (S) Budi Prasetyo	Narasumber 2
3.	Sermatutar (S) Moch. Yudhi Andika	Narasumber 3

Selain melaksanakan wawancara langsung dengan 3 orang narasumber terpercaya, penulis juga membuat kuesioner untuk 10 responden yang berkaitan langsung dengan pelaku penganggaran di masing-masing satker yang ada di Akademi Angkatan Laut guna mengumpulkan data selanjutnya agar menghasilkan data yang lebih valid dengan menerapkan metode kualitatif secara analisis deskriptif.

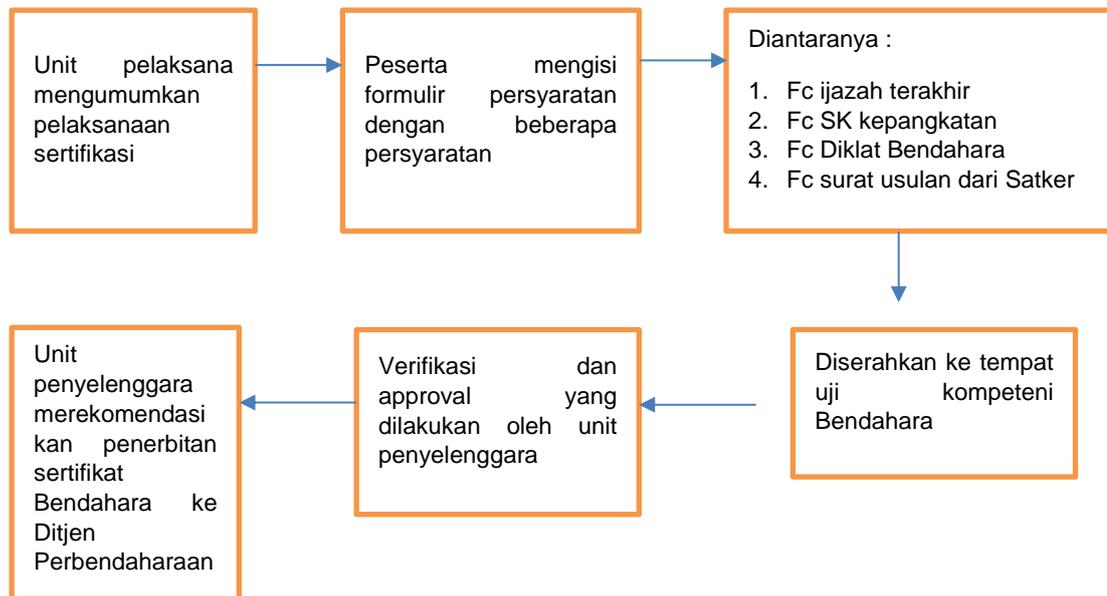
Hasil wawancara terstruktur yang penulis lakukan terhadap 3 orang narasumber yang berhubungan langsung dengan Akun Akademi Angkatan Laut menyatakan bahwa kinerja staf Akun Akademi Angkatan Laut kurang optimal. Hal ini dapat dilihat adanya keterlambatan pencairan uang saku taruna Akademi Angkatan Laut yang seharusnya menurut aturan harus sudah masuk paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya menurut narasumber, diantaranya jabatan Bendahara Pengeluaran Akun masih kosong sehingga kurangnya kontrol terhadap kinerja staf. Disamping itu perwira yang mengawaki staf akun menjabat lebih dari satu jabatan karena kurangnya personel sesuai

DSP (Daftar Susunan Personel). Idealnya jabatan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Akademi Angkatan Laut harus memiliki kualifikasi sertifikasi Bendahara Pengeluaran sebagai bukti administrasi telah mengikuti proses menuju kinerja yang profesional di bidang pengurusan keuangan negara. Kondisi saat ini pejabat Bendahara Pengeluaran yang ada belum bersertifikasi dan sangat perlu dilaksanakan sertifikasi Bendahara Pengeluaran agar dapat meningkatkan profesionalitas kinerja Bendahara Pengeluaran.

Berkaitan dengan DSP di lingkungan Akademi Angkatan Laut hendaknya lebih diperhatikan kembali agar tidak terdapat perwira pertama Korps Suplai yang menjabat lebih dari 1 jabatan sehingga berakibat kurangnya konsentrasi dalam bekerja dalam jabatan tersebut. Sedangkan kaitannya dengan pelaksanaan sertifikasi Bendahara Pengeluaran di lingkungan TNI Angkatan Laut dapat diawali untuk perwira pertama Korps Suplai sejak menjabat sebagai Kadeplog di KRI. Adapun persyaratan sertifikasi Bendahara Pengeluaran sesuai PMK Nomor 126/PMK.05/2016 diantaranya adalah 1) PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2) Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, Golongan paling rendah II/b atau sederajat, 3) Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara.

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam PMK Nomor 126/PMK.05/2016 itu hanya dapat dilaksanakan minimal oleh perwira pertama, dan untuk saat ini kebanyakan perwira pertama Korps Suplai berdinasa di KRI oleh sebab itu terjadi kekosongan jabatan Bendahara Pengeluaran. Jika mulai dari saat perwira pertama Korps Suplai menjabat kadeplog KRI sudah dilaksanakan sertifikasi dan pelatihan dalam Bendahara Pengeluaran maka SDM perwira pertama Korps Suplai akan lebih siap dan tersedia untuk mengawaki jabatan Bendahara Pengeluaran sehingga tidak mengalami kekosongan jabatan.

Berikut ini merupakan tata cara seorang Bendahara Pengeluaran untuk mengikuti seleksi sertifikasi Bendahara Pengeluaran :



Gambar 4.1 tata cara sertifikasi Bendahara Pengeluaran

Saat ini pelatihan yang telah dilaksanakan adalah di lingkungan perwira menengah Korps Suplai. Diharapkan untuk kedepannya terdapat pelatihan dan sertifikasi untuk perwira pertama Korps Suplai agar dapat meningkatkan kemampuann di bidang Bendahara Pengeluaran dan siap dijadikan Bendahara Pengeluaran di seluruh satuan TNI angkatan Laut. Perwira pertama Korps Suplai seharusnya lebih memperdalam bidang pelatihan dan sertifikasi Bendahara Pengeluaran dikarenakan perwira pertama Korps Suplai yang terjun langsung dalam bidang Bendahara Pengeluaran dan perwira pertama Korps Suplai harus bekerja secara profesional. Apabila jumlah perwira pertama Korps Suplai yang sudah melaksanakan sertifikasi Bendahara Pengeluaran meningkat maka akan diproyeksikan mengisi kekosongan jabatan Bendahara Pengeluaran. Dan jika Bendahara Pengeluaran sudah melaksanakan sertifikasi terutama di lingkungan Akademi Angkatan Laut maka akan dapat bersaing dengan Bendahara Pengeluaran di luar instansi TNI Angkatan Laut dan dapat di unggulkan dalam bidang profesionalitas kinerja Bendahara Pengeluaran. Begitu pula untuk mengisi jabatan Bendahara Pegeluaran di lingkungan Akademi Angkatan Laut serta dapat membantu membagi ilmu yang dimiliki kepada Taruna Akademi Angkatan Laut untuk menjadi bekal awal kepada Taruna Akademi Angkatan Laut dalam kedinasan nantinya. Dengan demikian dapat meningkatkan kinerja Akun untuk mengelola keuangan negara.

4 KESIMPULAN

Secara esensi kualitas kinerja Bendahara Pengeluaran di Akademi Angkatan laut masih belum optimal diantaranya karena kekosongan jabatan dalam Bendahara Pengeluaran di lingkungan Akademi Angkatan Laut. Jabatan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh perwira yang secara struktural tidak menduduki jabatan tersebut. Disamping itu perwira tersebut juga menjabat lebih dari 1 jabatan sehingga menyebabkan kurang maksimalnya kinerja Bendahara Pengeluaran. Permasalahan kurangnya perwira pertama Korps Suplai di lingkungan Akademi Angkatan Laut juga mengakibatkan sulitnya pimpinan dalam mencari pengganti pejabat Bendahara Pengeluaran yang kosong. Secara ideal jabatan tersebut harus selalu diisi sesuai dengan kriteria pada Bendahara Pengeluaran. Secara administrasi untuk memperkuat jabatan secara profesional di bidang keuangan dengan diadakannya sertifikasi Bendahara Pengeluaran sesuai PMK No. 126/PMK.05/2016 sedangkan Bendahara Pengeluaran yang ada saat ini belum melaksanakan sertifikasi disebabkan belum adanya sertifikasi pada level perwira pertama di lingkungan TNI Angkatan Laut.

DAFTAR RUJUKAN

- Effendi Rizal (2013). *Accounting Principles: Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*: Rajagrafindo Persada
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode Penelitian Masyarakat*: Gramedia Pustaka Utama
- Krismanto Manik A. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Samosir Dengan Motivasi*.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* : Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Kementerian Negara, Lembaga, Kantor, Dan Satuan Kerja.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Sertifikasi Bendahara Pegeluaran Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Poerwadarminta W.J.S. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Balai Pustaka.
- Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons .(2009). *Engineering Optimization: Theory and Practice*, John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Susilawati Heri. (2014). Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Winardi. (1999). Motivasi dan Pemasalahan dalam Manajemen: BPFE-Yogyakarta